

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah sebagai organisasi tertinggi dalam sebuah negara bertujuan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Adanya perbedaan budaya dan gaya hidup serta tuntutan masyarakat mengenai transparansi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah di setiap daerah membuat pemerintah pusat mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini memicu pemerintah memberlakukan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan sekarang menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sekarang menjadi Undang-undang No. 33 tahun 2004.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat beralih kepada pemerintah daerah termasuk di dalamnya adalah kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Rompas (2014), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber - sumber keuangannya sendiri.

Sejalan dengan kewenangan yang diberikan dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan

pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mustafa dan Halim, 2008).”

Kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah kini menjadi sorotan banyak pihak seiring dengan semakin tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap perkembangan yang terjadi. Masyarakat mulai menuntut transparansi dan akuntabilitas dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah khususnya kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah tersebut.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam sebuah organisasi termasuk organisasi sektor publik. Adanya pengukuran kinerja dapat membantu menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga jika target yang telah direncanakan belum tercapai pengukuran kinerja ini dapat menjadi acuan untuk memperbaiki pelaksanaan program kedepannya dan sekaligus untuk memastikan apakah keputusan yang diambil sudah dilakukan secara tepat dan akurat.

Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Kecerahan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Simalungun merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki luas 4.386,60 Km<sup>2</sup> atau sekitar 6,12% dari luas provinsi Sumatera Utara yang menjadikannya sebagai daerah terluas ketiga setelah kabupaten Madina dan Langkat. Simalungun merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan atau memiliki pertumbuhan ekonomi yang tergolong rendah.

Mahardika News (Senin, 16 Desember 2013), tahun 2014 APBD Kabupaten Simalungun mencapai 1,9 triliun. Jumlah ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 Kabupaten Simalungun mengalami kenaikan APBD setiap tahunnya. Tahun 2010 APBD Simalungun sebesar Rp 900 miliar lebih, pada tahun 2011 naik menjadi Rp 1,1 triliun, tahun 2012 menjadi Rp 1,2 triliun hingga pada tahun 2013 menjadi Rp 1,4 triliun dan di 2014 menjadi Rp 1,9 triliun.

MetroSiantar.com (27 Mei 2014) diketahui bahwa BPK – RI memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2013. Menurut Fraksi PDI-P yang diwakili oleh Ir. Rospita Sitorus menyatakan bahwa Fraksi PDI-P menilai ada banyak kejanggalan atau ketidakwajaran sehingga BPK RI tidak memberikan pendapat, antara lain kebijakan bupati dalam hal penempatan pejabat yang tidak profesional di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemudian pengawasan internal Pemkab Simalungun yang dinilai masih lemah.

Kompas.com ( Rabu, 24 Juli 2013), diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun masih sangat jauh dari target yang telah ditentukan. Centre For Research of Public Budgeting (Cerpup) menilai ada yang salah urus dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ini. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya upaya perbaikan kinerja, sehingga target yang telah ditentukan tidak dapat tercapai. Selain itu dari MetroSiantar.com, diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah yang salah arah ini menjadi pemicu besarnya beban utang kabupaten Simalungun. Penggunaan dana yang tidak efektif, boros dan tidak sesuai dengan peruntukannya menjadi penyebab utama.

Dengan memperhatikan kenaikan APBD kabupaten Simalungun yang secara bertahap terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010 namun masih kurang optimal dalam pengelolaan keuangannya, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten simalungun. Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten simalungun adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten simalungun.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2010-2014”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah tahapan untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi ada beberapa masalah yaitu:

1. Simalungun merupakan salah satu kabupaten terbesar di Sumatera Utara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah namun memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah.
2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun masih sangat jauh dari target yang telah ditentukan.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dibahas dengan tuntas dan terfokus diperlukan adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada Analisis kinerja keuangan yang dilihat dari aspek Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun pada tahun 2012 dan 2013.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio

Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan dan Rasio Keserasian untuk tahun anggaran 2012-2013?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan dan Rasio Keserasian untuk tahun anggaran 2012-2013.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan serta menambah kompetensi bagi peneliti dalam bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan analisis efisiensi kinerja keuangan sektor publik.
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah kabupaten Simalungun untuk menggambarkan kinerjanya, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode selanjutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan bagi yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sama.